

Judul : 130 M Dana Pengawasan Penerbangan Dipakai Apa?
Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Soroti Kecelakaan JT610

130 M Dana Pengawasan Penerbangan Dipakai Apa?

Komisi V DPR mempertanyakan penggunaan dana pengawasan penerbangan yang mencapai Rp 130,6 miliar di Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, meski sudah ada anggaran begitu besar, masih saja ada kecelakaan pesawat.

PERTANYAAN Komisi V ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Kemenhub, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut sebenarnya membahas RAPBN 2019. Namun, dengan kecelakaan yang menimpa Lion Air JT-610 Jakarta-Pangkalpinang, di Perairan Karawang. Senin pagi kemarin, pembahasan berbelok ke penggunaan dana pengawasan penerbangan.

"Salah satu topik yang mengemuka di dalam rapat tadi (kemarin, red) soal anggaran Rp 130,6 miliar untuk pengawasan dan kelaikan udara. Ini untuk apa? Apanya yang diawasi?" ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, se usai rapat.

Jika dibagi 12, lanjut Fary, anggaran pengawasan per bulan mencapai Rp 11 miliar. Dengan duit sebanyak itu, harusnya Kemenhub bisa mengecek semua sisi pesawat yang akan terbang. Namun, pengecekan seperti itu tidak efektif. Buktinya, kecelakaan pesawat kembali terjadi. "Ini kan harus dipertanggungjawabkan," cetus politisi Partai Gerindra ini.

Fary mengaku amat heran dengan kerja bidang pengawasan

saat terbang dari Bali menuju Jakarta.

"Ini kan aneh. Terbang dari Bali ke Jakarta sudah ada gangguan teknis tapi masih dapat izin terbang juga," ucapnya.

Atas kecelakaan itu, Komisi V akan mengevaluasi tiket berbiaya murah. "Salah satu yang kita evaluasi adalah komponen-komponen tiket berbiaya murah. Apakah komponen-komponen maintenance-nya dan biaya operasionalnya juga bisa menutupi dan sebagainya," terangnya.

Fary melihat, biaya tiket yang murah identik dengan mengesampingkan aspek-aspek keselamatan penerbangan. Dengan harga murah yang diberikan, maskapai seperti sewenang-wenang dalam memperlakukan penumpang.

DPR sebenarnya sudah berkali-kali menyampaikan masalah itu. Namun, selama ini kurang ditangani dengan baik oleh Pemerintah. "Banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan safety security dan kenyamanan. Tapi, tidak ada tuh upaya-upaya tentang perbaikan," pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR Rahmat Hamka Nasution meminta semua pihak terkait penerbangan berpegang kepada Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika tidak ada yang

sesuai SOP, berarti ada pelanggaran dalam kecelakaan Lion Air JT-610.

"Semua itu kan ada SOP-nya. Kemenhub dan maskapai penerbangan itu kan masing-masing ada SOP-nya. Jangan pas kejadian, baru pada ribut-ribut," ujar politisi muda PDIP ini.

Die juga menyoroti gangguan teknis yang menimpa pesawat itu sebelum kejadian. Sayangnya, pihak berwenang tetap mengizinkan pesawat itu

beroperasi.

"Ini kan sesuatu hal yang kadang-kadang mengusik hati kita. SOP-nya seperti apa sih? Menurut kami, jangan gegabah lah. Kita berharap, operator jangan mau diatur pengusaha atau maskapai," tegasnya.

Anggota Dewan asal Kalimantan Tengah itu meminta kepada pihak maskapai patuh terhadap SOP penerbangan yang berlaku berdasarkan UU Nomor 1/2009. Jangan sekali-kali keluar

dari jalur tersebut. Sebab, hal itu karena menyangkut nyawa manusia. "Seharusnya para operator juga mempunyai sikap yang patuh dan disiplin yang tinggi," tutup Rahmat.

Sedangkan Anggota Komisi V Anton Sihombing mengaku heran dengan kecelakaan itu. Padahal, pesawat Boeing 737-8 MAX yang dipakai Lion Air terhitung baru. "Apa ada sesuatu yang salah?" tanya politisi Partai Golkar ini. ■ RMOL



DUET: Anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri) dan pengurus Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow dalam diskusi Forum Legislasi yang bertajuk "RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.